

**REKAPITULASI PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN  
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU Januari 2024 S.D 31 Desember 2024**

**1. Pengaduan dan/atau Laporan Masuk Per-Bulan**

No	Pengaduan	
	Bulan	Jumlah
1	Januari	33
2	Februari	24
3	Maret	97
4	April	72
5	Mei	79
6	Juni	70
7	Juli	62
8	Agustus	42
9	September	39
10	Oktober	73
11	November	73
12	Desember	126
Total		790

**2. Sebaran pengaduan dan/atau Laporan Setiap Provinsi**

<b>Jumlah Pengaduan Luar Negeri : 3</b>			
<b>Jumlah Pengaduan Pusat : 29</b>			
No	Jumlah Pengaduan		
	Nama Provinsi	Jumlah	Persentase
1	Sumatera Utara	74	9.76%
2	Sumatera Selatan	56	7.39%
3	Jawa Barat	52	6.86%
4	Jawa Timur	51	6.73%
5	Papua Tengah	39	5.15%
6	Sulawesi Selatan	38	5.01%
7	Papua Pegunungan	33	4.35%
8	Sulawesi Tenggara	32	4.22%
9	Aceh	28	3.69%

10	Jawa Tengah	27	3.56%
11	Sulawesi Utara	25	3.30%
12	Sumatera Barat	24	3.17%
13	P A P U A	23	3.03%
14	Sulawesi Tengah	19	2.51%
15	Papua Barat Daya	17	2.24%
16	Maluku	17	2.24%
17	Nusa Tenggara Barat	16	2.11%
18	Nusa Tenggara Timur	14	1.85%
19	Banten	13	1.72%
20	Kalimantan Selatan	13	1.72%
21	Gorontalo	13	1.72%
22	Papua Barat	12	1.58%
23	Bengkulu	12	1.58%
24	Lampung	12	1.58%
25	Kepulauan Bangka Belitung	12	1.58%
26	Kepulauan Riau	11	1.45%
27	Riau	10	1.32%
28	Kalimantan Barat	10	1.32%
29	Jambi	9	1.19%
30	Dki Jakarta	9	1.19%
31	Maluku Utara	7	0.92%
32	Kalimantan Timur	7	0.92%
33	Kalimantan Utara	6	0.79%
34	Kalimantan Tengah	5	0.66%
35	Sulawesi Barat	5	0.66%
36	Papua Selatan	4	0.53%
37	Daerah Istimewa Yogyakarta	2	0.26%
38	Bali	1	0.13%
<b>Total</b>		<b>758</b>	<b>100.00%</b>

### 3. Unsur Pengadu

No	Unsur Pengadu	Jumlah
1	Masyarakat / Pemilih	583
2	Penyelenggara Pemilu	71
3	Partai Politik	48
4	Peserta Pemilu / Paslon	45
5	Anggota Dewan	32
6	Tim Kampanye	13
<b>Total</b>		<b>792</b>

#### 4. Unsur Teradu Per-Lembaga

No	Lembaga Penyelenggara	Jumlah Teradu
1	KPU Kab / Kota	497
2	Bawaslu Kab / Kota	277
3	KPU RI	93
4	Bawaslu Provinsi	65
5	Bawaslu RI	56
6	PPK / PPD	19
7	KPU Provinsi	18
8	Panwascam	3
9	PPS	2
10	Sekretariat KPU	2
11	Lain - lain	2
12	KPPS	1
13	KPPSLN	0
14	PPL	0
15	Pengawas LN	0
16	Sekretariat Bawaslu	0
<b>Total</b>		<b>1035</b>

#### 5. Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
<b>A. Tahapan Pemilu / Pemilihan</b>		
1	Rekapitulasi Perhitungan Suara	156
2	Pemungutan dan Perhitungan Suara	35
3	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota	29
4	Penangan Pelanggaran (Administrasi, Pidana, Sengketa, & Proses)	25
5	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	17
6	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	16
7	Pentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu	16
8	Pengawasan tahapan Pemilu	12
9	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-hoc	10
10	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	10
11	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	4
12	Laporan dan Audit Dana Kampanye	4
13	Pengawasan tahapan Pilkada	4
14	Masa Tenang	3

15	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3
16	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	2
17	Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri	2
18	Perencanaan Program dan Anggaran	1
19	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	1
20	Pembentukan Panwas Ad-hoc	1
21	Sosialisasi	0
22	Penyusunan Peraturan KPU	0
23	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)	0
24	Logistik	0
25	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	0
26	Peresmian Keanggotaan	0
27	Pengucapan Sumpah /Janji	0
<b>Total</b>		<b>351</b>

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
<b>B. Non Tahapan Pemilu / Pemilihan</b>		
1	Tidak Menjalankan Tugas	57
2	Keberpihakan	48
3	Money Politic/ Korupsi/ Penyusunan	39
4	Rekrutmen Jajaran Bawaslu	39
5	Penyalahgunaan Wewenang	26
6	Rekrutmen Jajaran KPU	24
7	Lain - Lain	20
8	Berafiliasi dengan Parpol	15
9	Pelecehan Seksual/Asusila	15
10	Rangkap Jabatan	12
11	Pemberhentian Ad Hoc	11
12	Pemberhentian Penyelenggara Pemilu Kab/Kota	8
13	Pernyataan Kontroversial	8
14	Penganiayaan	7
15	Keluarga	4
16	PAW Penyelenggara Pemilu	2
17	Penyalahgunaan Narkotika	2
18	PAW Legislatif	1
19	Rekrutmen Pegawai	1
<b>Total</b>		<b>339</b>

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
<b>C. Tahapan Pilkada</b>		
1	Penelitian persyaratan pencalonan	47
2	Pembentukan PPK, PPS, dan KPSS	40

3	Penanganan laporan oleh Bawaslu	38
4	Penetapan Pasangan Calon	36
5	Pelaksanaan Kampanye	36
6	Lain-lain	30
7	Pendaftaran pasangan Calon	28
8	Tindaklanjut Rekomendasi oleh Bawaslu	24
9	Penelitian syarat calon	13
10	Pelaksanaan pemungutan suara	13
11	Penetapan calon terpilih	13
12	Verifikasi dukungan pencalonan	9
13	Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	8
14	Pelaksanaan Tugas Tidak Sesuai Peraturan Bawaslu	8
15	Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan	7
16	Rekapitulasi Perhitungan Suara	6
17	Pengawasan Tahapan Pemilihan	6
18	Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih	2
19	Pengumuman pendaftaran pasangan Calon	2
20	Perencanaan program dan anggaran	0
21	Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan	0
22	Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan	0
23	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan	0
24	Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih	0
25	Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih	0
26	Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Independen	0
<b>Total</b>		<b>366</b>

## 6. Pelanggaran Prinsip Penyelenggara Pemilu

No	Prinsip yang Dilanggar	Jumlah Teradu
1	Prinsip Profesional	242
2	Prinsip Berkepastian Hukum	126
3	Prinsip Akuntabel	100
4	Prinsip Mandiri	57
5	Prinsip Jujur	46

No	Prinsip yang Dilanggar	Jumlah Teradu
6	Prinsip Adil	32
7	Prinsip Tertib	19
8	Prinsip Terbuka	10
9	Prinsip Proporsional	6
10	Prinsip Melanggar Sumpah Dan Janji	4
11	Prinsip Kepentingan Umum	3
12	Prinsip Aksesibilitas	0
13	Prinsip Efektif	0
14	Prinsip Efisien	0
15	Lain - lain	0
Total		645

